



RENCANA KERJA

Pembangunan Zona Integritas

Tahun 2019



**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN (BBPPTP) SURABAYA**

Jln. Raya Mojoagung No. 52, Mojoagung-Jombang 61482 (0321) 496430

KATA PENGANTAR

Pembangunan Zona Integritas ini merupakan upaya kesungguhan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya dalam mewujudkan komitmen anti korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penetapan dokumen rencana ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya sehingga lebih efektif, efisien, profesional dan akuntabel dalam mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Semua unit kerja lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya dapat menunjukkan komitmen dan keterlibatannya dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Besar harapan kami rencana kerja ini dapat dilaksanakan sebaik baiknya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya

Jombang, Pebruari 2019
Kepala BBPPTP Surabaya



Ardi Praptono, SP, M.Agr
NIP. 19740913 199903 1 001

PENGESAHAN

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DAR! KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2019

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Jombang, Pebruari 2019

Kepala BBPPTP Surabaya



Ardi Praptono, SP, M.Agr

NIP. 19740913.199903 1 001

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK /
WBBM DI UNIT KERJA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

I. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK / WBBM) ;
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM

III, RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

1. Manajemen Perubahan

Indikator :

- A. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembentukan tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM
- b. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur / mekanisme yang jelas

- B. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Melibatkan tim kerja dan stakeholder internal dan eksternal
 - b. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM
 - c. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM
- C. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM
- Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan Pembangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani mengacu pada target yang telah direncanakan
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM
 - c. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi
- D. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
- Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
- a. Pimpinan menjadi role model dalam Pembangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
 - b. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas
 - c. Pelaksanaan sosialisasi budaya kerja dan pola pikir
 - d. Seluruh staf terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM

TARGET

- a. Meningkatnya komitmen seluruh staf BBPPTP Surabaya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- b. Terjadinya perubahan budaya kerja dan pola pikir pada staf BBPPTP Surabaya sesuai usulan sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM

- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi akibat perubahan

2. Penataan Tatalaksana

Indikator :

- A. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama dan Kegiatan Pendukung
 - a. Penyusunan SOP kegiatan utama dan kegiatan pendukung mengacu kepada bisnis proses BBPPTP Surabaya
 - b. Penerapan SOP secara efektif
 - c. Evaluasi / revisi SOP
- B. E-office / e-government
 - a. Penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi
 - b. Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi
 - c. Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi
 - d. Penyusunan sistem penatausahaan aset pada BBPPTP Surabaya
 - e. Penyusunan sistem administrasi Tata usaha berbasis sistem informasi
 - f. Penyusunan sistem informasi publik berbasis sistem informasi

TARGET

- a. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK /WBBM
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator :

- A. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - a. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja
 - b. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerja BBPPTP Surabaya
- B. Pola Mutasi Internal
 - a. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal

- b. Penerapan kebijakan pola mutasi internal
 - c. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal
- C. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi**
- a. Penganggaran kegiatan peningkatan kapasitas SDM berbasis kompetensi melalui Diklat /inhouse training
 - b. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan peningkatan kapasitas SDM berbasis kompetensi Diklat /inhouse training
- D. Penetapan kinerja individu**
- a. Membangun inovasi sistem pengukuran kinerja unit dengan menggunakan teknologi informasi.
 - b. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya sesuai Balance Scorecard (BSC)
 - c. Monitoring dan evaluasi kinerja individu dilakukan secara bulanan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam unit kerja lingkup BBPPTP Surabaya
 - d. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantapan
- E. Penegakan aturan disiplin / kode etik /kode perilaku pegawai**
- a. Penerapan aturan disiplin kode etik /kode perilaku pegawai
 - b. Penerapan ketidakberpihakan melalui pakta integritas
- F. Sistem informasi kepegawaian**
- a. Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala

TARGET :

- a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK / WBBM
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK / WBBM
- c. Meningkatnya disiplin, integritas dan ketidakberpihakan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK / WBBM
- d. Meningkatkan efektivitas kinerja dalam pencapaian target organisasi yang telah ditentukan

- e. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK / WBBM
- f. Meningkatnya profesionalisme aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK / WBBM

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator :

A. Keterlibatan Aktif Pimpinan Organisasi

- a. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan
- b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja
- c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara bulanan

B. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

- a. Penyusunan dokumen perencanaan
- b. Dokumen perencanaan berorientasi hasil
- c. Penetapan indikator kinerja utama
- d. Indikator kinerja memiliki kriteria SMART-C
- e. Penyusunan laporan kinerja (LAKIN)
- f. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

TARGET :

- a. Meningkatnya kinerja yang lebih terarah pada pencapaian sasaran dan target organisasi masing-masing unit kerja lingkup BBPPTP Surabaya
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

5. Penguatan Pengawasan

Indikator

A. Pengendalian Gratifikasi

- a. Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi
- b. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi

B. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

- a. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja
- b. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait
- c. Sosialisasi SPI ke internal dan eksternal

- C. Pengaduan Masyarakat
 - a. Menerapkan Whistle Blowing System
 - b. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System
 - c. Menindaklanjuti evaluasi penerapan Whistle Blowing System
 - d. Membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
- D. Penanganan Benturan Kepentingan
 - a. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
 - b. Mengsosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan
 - c. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
 - e. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan

TARGET :

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing unit kerja lingkup BBPPTP Surabaya
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing unit kerja lingkup BBPPTP Surabaya
- c. Menurunnya temuan audit terkait ketidakpatuhan pengelolaan keuangan negara
- d. Menurunnya tingkat penyalagunaan wewenang

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator :

- A. Standar Pelayanan
 - a. Penyusunan standar pelayanan publik (SPP)
 - b. Penyusunan SOP bagi standar pelayanan
 - c. Melakukan rewiu dan revisi atas SPP dan SOP
- B. Budaya Pelayanan Prima
 - a. Melakukan sosialisasi / pelatihan dalam penerapan budaya pelayanan prima

- b. Memiliki informasi tentang pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat
 - c. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar
- C. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
- a. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
 - b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
 - c. Melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas penanganan pengaduan masyarakat
 - e. Melakukan tindak lanjut atas seluruh survey kepuasan masyarakat.
- D. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Publik
- a. Melakukan perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan publik
 - b. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan publik

TARGET

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (Cepat, Tepat dan Akurat) pada BBPPTP Surabaya
- b. Implementasi standarisasi ISO 9001 : 2015 pada semua unit pelayanan di BBPPTP Surabaya
- c. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
- d. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan publik

Kepala BBPPTP Surabaya

Ardi Praptono, SP, M.Agr
NIP. 19740913 199903 1001

**RENCANA KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK
DAN WBBM TAHUN 2018**

| No | Kegiatan / Komponen | | Detail Kegiatan | Target/Output | Penanggung Jawab | Target Partisipan | Waktu Pelaksanaan |
|----|----------------------|---|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | Managemen Perubahan | 1 | Penyusunan SK Tim Pelaksana Zona Integritas | Pengelolaan zona integritas lebih terarah | KaSub Bag TU | Kesekretariatan | Januari 2018 |
| | | 2 | Penyusunan SK agen perubahan | Terbentuknya agen perubahan | KaSub Bag TU | Kesekretariatan | Pebruari 2018 |
| | | 3 | Sosialisasi Zona menuju WBK dan WBBM | Pemahaman seluruh pegawai | KaSub Bag TU | Seluruh pegawai | Maret 2018 |
| 2 | Penataan Tatalaksana | 1 | Penyusunan Dokumen Pedoman dan Perencanaan Kegiatan Pembangunan ZI di Satker | Sebagai acuan dan pedoman | Tim Zona Integritas (ZI) | Struktural dan pegawai | Pebruari 2018 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--|--|-----------------|---------------|
| | | 2 | Pengelolaan Sistem Manajemen ISO 9001 ; ISO 17025 dan ISO 17043 | Sistem yang sudah terakreditasi | Tim ZI dan SMM | | Maret 2018 |
| | | 3 | Penerapan Sistem Informasi untuk pengguna layanan (E-SIANI, SI-KENDI) | Kemudahan pengguna jasa | Tim Teknis Tim ZI | Pengguna jasa | Maret 2018 |
| | | 4 | Penerapan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi | Pemantauan kinerja individu lebih akurat | Ka Sub Bag TU dan Tim Teknis Tim ZI | Seluruh pegawai | Pebruari 2018 |
| | | 5 | Penatausahaan aset pada BBPPTP Surabaya | Pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum | Ka Sub Bag TU dan Tim Teknis Tim ZI | Seluruh pegawai | Maret 2018 |
| 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 1 | Melakukan rotasi pegawai fungsional | Meningkatkan inovasi dan | Kepegawaian | Fungsional umum | Maret 2018 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------|---|--------------------------|
| | | | umum untuk penyegaran dan kebutuhan | keativitas pegawai | | | |
| | | 2 | Pembinaan pegawai dalam rangka sosialisasi budaya kerja, kode etik dan WBK/WBBM | Meningkatkan kinerja individu | KaSub Bag TU | Seluruh pegawai | Agustus 2018 |
| | | 3 | Memfasilitasi pelaksanaan magang, pelatihan dan induction training | Peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM | Ka Sub Bag Tata Usaha | Fungsional tertentu dan fungsional umum | Pebruari - Nopember 2018 |
| | | 4 | Membuat Nilai Standar kompetensi Pemetaan Analisa Kebutuhan dan Rencana pengembangan kompetensi SD | tersedia data kebutuhan dan kompetensi pegawa | Analisis kepegawaian | Analisis kepegawaian | Maret 2018 |
| | | 5 | Penilaian kinerja individu bulanan dengan E-Personal | tersedia nilai SKP bulanan kinerja setiap individu | Pejabat Struktural | Semua pegawai | Bulanan |
| 4 | Akuntabilitas Kinerja | 1 | Melakukan koordinasi | tersediannya | Tim ZI | tim Perencanaan | Pebruari – April |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | penyusunan rencana kegiatan dan pengukuran kinerja | dokumen perencanaan dan kinerja anggaran | Perencanaan | Dan penanggung jawab kegiatan | 2018 |
| | | 2 | Melakukan evaluasi atas dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Indikator Kinerja dan Perjanjian Kinerja | Tersedianya dokumen perencanaan | Tim ZI Perencanaan | Tim perencanaan | Pebruari – Maret 2018 |
| | | 3 | Melakukan monitoring penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja | tersedia laporan LAKIN | Tim ZI Perencanaan | Tim perencanaan | Desember 2018 |
| 5 | Penguatan Pengawasan | 1 | Sosialisasi Tugas pokok Unit Pengendali Gratifikasi | Pemahaman gratifikasi | Tim UPG Tim ZI | Seluruh pegawai | Mei 2018 |
| | | 2 | Sosialisasi Penerapan SPIP | Implementasi SPIP di tiap unit kerja | Tim SPIP | Unit kerja Lingkup BBPPTP | Januari 2018 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|---|---|--|--|-----------------|--------------------------|
| | | 3 | Sosialisasi Wishtle Blowing System (WBS) dan Pengaduan Internal | Pemahaman WBS | Tim ZI | Seluruh pegawai | Mei 2018 |
| 6 | Pelayanan Publik | 1 | Menampilkan survei kepuasan pelanggan secara terbuka di website | Memudahkan pengguna jasa memantau dan memberikan masukan terkait pelayanan | Unit Pelayanan | Unit pelayanan | Triwulan 2018 |
| | | 2 | Melakukan optimalisasi SI-ANI (pelayanan mobil keliling) | Menjangkau petani di wilayah kabupaten di Jawa Timur | Tim Teknis | Tim Teknis | Pebruari – Desember 2018 |
| | | 3 | Melakukan review dokumen Standar Pelayanan Publik | tersedia informasi keefektifan | Tim Teknis Tim ZI Unit pelayanan | Tim SPP / ISO | Pebruari – Maret 2018 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|-------------------------------------|----------------------|
| | | | (SPP) | Prosedur yang berhubungan dengan Pelayanan Publik | | | |
| | | 4 | Melakukan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat | Reviu komparasi kuisioner survei dengan dialog langsung | Tim Teknis Tim ZI Unit pelayanan | Pelanggan pelayanan BBPPTP Surabaya | Setiap triwulan 2018 |